

Arif Akbarul Huda, S.Si., M.Eng. Dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

PADA dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya, sayangnya kebanyakan tidak menyadarinya. Menurut pandangan masyarakat umum, sesuatu dianggap karya bila impact-nya luas dan banyak memperoleh apresiasi. Seperti menciptakan lagu dan didengarkan puluhan juta pasang telinga. Sedangkan kalau pak Tjipto menciptakan patung wayang di sudut rumahnya, dia justru dianggap kurang kerjaan bukan berkarya.Dalam KBBI, karya

Dear Zilenial, Setel Ulang Hidupmu Melalui Karya

didefinisikan sebagai sebuah ciptaan atau hasil dari sebuah perbuatan. Tentunya dalam konteks positif. Nayla, seorang anak kecil yang bergumam ceria mengarang nada, menurut saya itu adalah karya. Bu Juminten, Ibu rumah tangga yang meng-inisiasi pengajian Ibu-ibu, itu juga karya. Setiap orang punya cara sendiri untuk menghasilkan luaran atau buah dari pemikiran. Dewa Budiana, mengekspresikan perjalanan spiritual melalui alunan musik. Dedy Corbuzier, menuangkan energi dan pemikirannya melalui video. Tidak sedikit orang hebat mengekspresikan pemikirannya melalui pergerakan, kegiatan masyarakat, atau diskusi. Ada juga yang melalui tulisan, video, lagu, puisi, dan lukisan

Berikut empat tips mudah untuk berkarya. Menuangkan Ide dalam bentuk tulisanZilenial, menulis itu tidak sulit. Buktinya, kita sering menulis status. Baik Story Whatsapp, Instagram, atau lainnya. Merangkai kalimat-kalimat pendek untuk mencurahkan pikiran Terkadang dilengkapi dengan photo supaya lebih ekspresif. Sayangnya tulisan-tulisan yang diaunggah melalui status, akan hilang dalam hitungan jam.

Seandainya uneq-uneq yang ada dalam pikiran, dituangkan dalam blog maka tulisan Anda akan iauh lebih membawa manfaat. Tidak perlu berekspektasi tulisan Anda bermanfaat untuk orang lain apalagi mengeiar jumlah pembaca. Itu tidak penting. Tulisan merupakan representasi dari pengetahuan kita pada waktu itu. Kelak lima tahun yang akan datang, bila Anda membuka kembali tulisan tersebut akan terkejut merasakan perkembangan pengetahuan yang

signifikan pada diri kita sendiri.Menyalurkan uneg-uneg melalui laguBila anda dianugerahi Tuhan kemampuan bermusik, tidak ada salahnya Anda berterimakasih kepada Tuhan dengan cara mengoptimalkan potensi bermain musik. Anda bisa membuat cover lagu, atau merangkai sendiri katakata cantik

Tidak perlu berpikiran siapa yang mau mendengarkan. Jangankan orang lain, sebagai pemula Anda berani mendengarkan rekaman suara sendiri saia sudah bagus. Ebiet, konsisten mencurahkan pemikirannya yang kritis mengenai hubungan manusia dengan alam lewat lirik. Iwan Fals, menyalurkan energi dan kritiknya melalui lagu. Dan masih banyak lagi musisi seniman yang konsisten berkarya melalui musik. Meskipun banyak juga lagu yang lahir mengikuti

kebutuhan industri. Apalagi, era teknologi modern ini sangat mendukung proses self recording Berbagai tutorial bertebaran, memanipulasi pitch suara sumbang menjadi sempurna. Hampir tak ada alasan, terkendala masalah peralatan. Sharing dalam forum diskusi Apabila Anda aktif bermasyarakat, beranikanlah untuk menyampaikan pendapat. Yang penting jangan baper jika berbeda pendapat, Keberanian Anda menyampaikan pendapat secara lisan merupakan modal kuat untuk berkarya. Karena pada dasarnya sebuah karya adalah wujud dari pikiran kritis yang lahir pada dirikita. Mendistribusikan karyaZilenial, Anda bebas mendistribusikan karya. Bisa melalui Youtube, Tiktok, Instagram, Whatsapp. Penting harus diingat bahwa karya dan apresiasi bukanlah dua hal yang harus selalu



berdampingan. Tidak sama seperti sisi uang koin. Mereka saling merdeka. Jangan sampai terkecoh, berkarya untuk mendapatkan apresiasi. Karena jika ternyata apresisasi tak sesuai ekspektasi, Anda bisa kapok berkreasi. Untuk berkarya, Anda tidak perlu menunggu hebat dulu, justru jadikan karya sebagai artifak perjalanan hebat dalam hidupmu.Manusia memiliki naluri untuk selalu bertanya jawab terhadap dirinya sendiri, tentang apapun. Fenomena ini sangat wajar mengingat knowladge selalu berubah seiring berjalannya waktu.

Apa yang hari ini kita anggap benar, besok kita anggap salah. Hal-hal yang tidak sesuai dengan nurani, atau hal yang sifatnya disruptif biasanya memicu pikiran untuk bertanya, Zilenial, berkaryalah maka Anda berpikir. Berpikirlah maka Anda hidup. (*)

SATPOL PP DIY SIAP BUBARKAN KERUMUNAN

Wisata Berjalan, Prokes Jadi Kewajiban

JAKARTA (KR) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya memulihkan sektor pariwisata Indonesia dengan meluncurkan beberapa program kebijakan. Salah satunya Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) yang tahun ini sebesar Rp 60 miliar.

Kemenparekraf juga tengah menggodok Dana Hibah Pariwisata Jilid II di 2021 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kemenparekraf. "Percepatan pembangunan kawasan lima destinasi super prioritas juga dilakukan, yaitu di Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Danau Toba. Pengembangan dilakukan dari berbagai aspek, mulai akselerasi infrastruktur oleh lintas sektor serta implementasi Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) di destinasi wisata," ujar Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henky Manurung di Jakarta, Rabu (9/6).

Henky Manurung menyatakan, ada keyakinan pertumbuhan sektor pariwisata bisa dicapai. Sebagai contoh, secara aktual perekonomian di Yogyakarta sudah tumbuh 6 persen dan diikuti pertumbuhan angka keterisian hotel. "Dengan situasi sekarang ini sebenarnya masyarakat rindu untuk berwisata, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan,"

kata Henky Manurung.

Menurut dr Ratih C Sari, seorang tenaga kesehatan dan pelaku perjalanan wisata, implementasi prokes di destinasi wisata sudah sangat layak untuk dikunjungi wisatawan. Hal itu menambah perasaan aman bagi masyarakat dan diimbau pula bagi wisatawan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. "Selama kita menjalankan protokol kesehatan, sebenarnya tidak mengurangi kesenangan yang kita dapat dari kegiatan berwisata, sehingga bisa kembali ke rumah dengan kondisi sehat," ucap-

Sementara itu Kepala Satpol PP Pemda DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta menyatakan, penegakan prokes masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan komitmen bersama. Sebab, kendati Pemerintah atau Satgas Covid-19 terus melakukan edukasi dan penegakan prokes, tapi realitanya masih ditemukan banyak pelanggaran. Terutama tidak memakai masker dan

kerumunan di tempat keramaian Karena itu, selain mengintensifkan edukasi dan pengawasan, Satpol PP DIY tidak segan untuk membubarkan kerumunan.

"Kami mencatat, pada Selasa (8/6) masih ditemukan 131 pelanggaran penegakan prokes. Memang dibutuhkan keseriusan dan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk segera mengakhiri pandemi ini," kata Noviar Rahmad.

Mengenai terjadinya kerumunan di restoran cepat saji, Noviar menyatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun surat izin dari pihak manajemen terkait kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tersebut. Namun pihaknya langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengaturan dan pembubaran. Jika tidak dilakukan pembatasan yang berujung menimbulkan kerumunan, dikhawatirkan bisa memicu terjadinya penularan Covid-19.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mencatat, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 304 menjadi 46.977 kasus, Rabu (9/6). Kasus sembuh bertambah 210 menjadi 42.991, dan kasus meninggal bertambah tujuh menjadi 1.239 kasus.

(San/Ria/Ira)-d

kurang lebih 10.000 orang tersebut di lapangan," ujarnya. berjalan dengan baik.

"Saya baru saja melihat proses vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebanyak kurang lebih 10.000 masyarakat umum, baik lansia, pralansia, tenaga pendidik, semuanya. Saya lihat manajemennya berjalan rapi dan baik

Presiden pun menyampaikan apresiasi dan terima kepada semua pihak, terutama Menteri Kesehatan, atas upaya terus-menerus dalam melaksanakan Program Vaksinasi Nasional. "Kita harapkan (vaksinasi) ini akan melindungi kita semuanya dari penyebaran Covid-19," pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, terdapat 79.194 orang yang menjadi target sasaran vaksinasi di kabupaten ini. Hingga 7 Juni 2021, sebanyak 84.302 orang telah mendapatkan vaksinasi

dosis pertama dan 67.325 orang men-

dapatkan vaksinasi dosis kedua. (Sim/Ati)-f

berupa guguran lava dan awan panas mengancam sektor Selatan-Barat Daya Gunung Merapi sejauh maksimal 5 km dan sektor Tenggara sejauh 3 km. Diperkirakan proses erupsi efusif Gunung Merapi masih akan terjadi beberapa bulan ke de-

"Berdasarkan informasi tersebut untuk sementara ini kondisi Candi Borobudur aman dari erupsi Gunung Merapi," katanya.

Dikatakan juga, kondisi bangunan Candi Borobudur yang ditutup terpal dalam jangka waktu lama juga perlu dibuka, untuk selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah konservasi agar batuan penyusun Borobudur tetap terawat.

Koordinator Aspek Pemanfaatan BKB Yudi Suhartono SS MA dan Ketua Pokja Pemeliharaan Candi Borobudur Brahmantara ST MA menambahkan, masukan dan saran

dari berbagai pihak terkait pembukaan kover Borobudur, dengan harapan wisatawan dan masyarakat dapat melihat Candi Borobudur secara alami dari jauh, tanpa penutup, juga menjadi pertimbangan. Harapannya masyarakat sekitar dan pelaku wisata juga berperan serta bersama-sama menjaga dan melindungi Candi Borobudur agar lestari dan dapat diwariskan kepada generasi men-(Tha)-f

Semisal, namanya Muhammad, tetapi ditulis ìMohammadî, atau ìMuhamadî, atau bahkan disingkat, ëMuhí.

Kedua ada datanya, tetapi orangnya sudah tidak ada, meninggal, atau pindah namun tidak lapor, atau lapor namun datanya tidak terintegrasi. Ini masalah pemutakhiran data. Dan tidak memungkiri kemungkinan ketiga, yaitu ada kesengajaan dari oknum aparat. Agar dapat dana bansos lebih banyak, apalagi jika pertanggungjawabannya mudah. Ini masalah moral dan penegakan hukum.

Masalah ini sudah berlarut-larut sebab (1) ketidaktahuan teknis; (2) kemalasan terkait pemutakhiran data; dan (3) ëbudaya korupí. Publik suudhon, karena penyaluran bansos sering mendekati pemilu / pilkada.

Persoalan basis data ini juga melanda pada data Covid-19. Akibatnya, sebagian negara kurang percaya manajemen Covid-19 kita. Saudi termasuk yang kurang percaya, dan akhirnya memutuskan tidak memberi Indonesia kuota haji.

Data memang seperti pisau. Dia bisa dipakai membantu melakukan kebaikan, bisa pula keburukan. Data panen yang beragam - tergantung konteksnya - dijadikan alasan Kementerian Perdagangan untuk mengizinkan impor beras, saat

Data Sambungan hal 1 Sedang cara menulis nama bervariasi. panen raya. Akibatnya harga di tingkat petani tertekan. Yang untung besar: im-

> Data kondisi BUMN dipoles kinclong menjelang pelepasan saham pertama (IPO), tetapi tak lama kemudian menjadi merah, utang triliunan, agar dapat bantuan dari negara. Tak heran, banyak orang tak berpengalaman berani didudukkan menjadi komisaris BUMN, tanpa rasa khawatir. Karena meski rugi dan utang membesar, toh gajinya tetap fantastis.

Data Sumber Daya Alam (SDA) kita dan ketersediaannya di masa depan masih tanda tanya. Angka pertumbuhan pun gelap. Namun ada orang yang tetap optimis tentang rasio utang dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau SDA bahkan mengundang investor. Apakah kita sengaja akan mengecoh investor? Untuk bakar uang?

Demikian juga dengan data spasial, alias peta. Di Austria, pemerintah menerbitkan peta masjid-masjid, yang oleh kalangan islamophobia dijadikan alasan untuk menakut-nakuti warga, seolah-olah ada teroris di sekitarnya. Peta ini diprotes kalangan muslim sebab dikhawatirkan meningkatkan kekerasan kepada minoritas muslim. Di tahun 1930-an, kekerasan sistemik pada Yahudi dimulai dengan peta semacam itu oleh Nazi. Di Israel, peta

Palestina diubah nyaris setiap hari. Agar zionis mendapat legalitas untuk mendirikan permukiman baru Yahudi dengan mengusir penduduk asli yang sudah

mendiami tanah itu turun-temurun selama beribu tahun. Di Indonesia, sejak UU Cipta Kerja disahkan, maka rencana tata ruang tidak perlu menunggu persetujuan DPRD. Rencana Tata Ruang cukup disetujui kepala daerah melalui Pergub/Perbup/Per-

wali. Bila peta detail skala besar (1:5.000) belum tersedia, maka perizinan bisa dilakukan pada peta Rencana Tata Ruang Wilayah skala menengah (1:50.000). Kita belum tahu, dampak ëderegulasi tata ruangí ini pada dinamika spasial kita.

Dulu, dengan aturan ketat saja, banyak rencana tata ruang yang ëugal-ugalaní, dan banyak kepala daerah terjerat hukum. Mungkinkah aturan ini sengaja diperlonggar agar aneka pelanggaran tidak lagi menjadi delik, dan ini akan meningkatkan minat investor?

Intinya adalah, untuk membuat keputusan publik, kita perlu data. Untuk mendapatkan data yang akurat, perlu riset. Di sinilah negara wajib hadir. Data berkualitas untuk mengisi kemerdekaan, bukan merdeka merekayasa data.

(Penulis adalah Peneliti Utama Badan

Informasi Geospasial)-d

Parkir 'Nuthuk' Coreng Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Parkir 'nuthuk' yang sempat dikeluhkan wisatawan beberapa waktu lalu merupakan hal yang bisa mencoreng keistimewaan Yogya. Sehingga sangat wajar jika semua pihak yang mencintai Yogya menjadi terganggu. Apalagi efek buruknya juga makin masif dan sudah beredar luas di sosial media. Dalam konteks itu maka untuk melindungi wajah keistimewaan Yogya diperlukan transformasi sistem perparkiran di DIY. "Transisinya bisa dilakukan dengan menerapkan sistem cerdas dari yang sebelumnya pelayanan secara manual atau analog, menjadi berbasis digital. Transformasi ini merupakan prasyarat efektifitas sistem parkir premium yang baik dan benar. Apabila hal itu bisa diterapkan selain pengunjung atau wisatawan bisa merasa nyaman, adanya parkir 'nuthuk' bisa dicegah,"

kata Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wismadi di Yogyakarta, Rabu (9/6).

Arif Wismadi menyatakan, tarif parkir premium umumnya merupakan bagian dari Traffic/Travel/Transport Demand Management (TDM) yang tujuannya menyeimbangkan pengaturan sistem mobilitas antara people-centered dengan infrastructure-centered. Ketika infrastruktur terbatas dan pengguna melebihi kapasitas infrastruktur, maka perlu ada pengaturan permintaan penggunaan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada kondisi dan waktu tertentu. Sehingga tarikan suatu lokasi terhadap penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang karena tingginya tarif parkir. (Ria)-f

PPDB Sambungan hal 1

ikan sebelumnya, kuota jalur PPDB yakni 55 persen untuk jalur Zonasi, 5 persen untuk zona perpindahan orang tua, 20 persen untuk jalur afirmasi dan 20 persen lainnya untuk jalur prestasi. Jika nantinya, kuota jalur afirmasi dan jalur pindah orang tua tak terpenuhi, maka siswa kuota dialihkan ke jalur prestasi. "Jadi komposisi jalur prestasi bisa lebih besar, dari kuota yang ditentukan," ujarnya.

Sedangkan bagaimana basis seleksinya, serta komposisi pembentukan rerata nilai gabungan ada dalam grafis di halaman 1. "Dalam PPDB di DIY ini, tetap membuka pintu bagi siswa luar DIY. Mereka bisa masuk lewat jalur prestasi, maupun jalur pindah tugas orang tua," ujar Didik sambil menambahkan bahwa DIY sudah dikenal sebagai pusat pendidikan, sehingga sejak dulu berdatangan warga dari luar daerah. Dikemukakan Didik. PPDB berbasis online di ppdb.jogjaprov.go.id. Nanti setiap calon mengajukan akun baru. Sedangkan pengajuan akun untuk mendapatkan Pin atau Token dimulai tanggal 21-24 Juni 2021. Lebih lengkapnya proses pendaftaran lihat grafis.

Sebelum pelaksanakan pengambilan token, sebetulnya sudah ada tahapan yang sudah dilakukan, yakni pengecekan data (8-10 Juni), verifikasi dokumen untuk prestasi non akademik, keluarga tidak mampu dan perpindahan orang tua.

Sejauh ini fasilitas atau perangkat jaringan yang berkaitan PPDB telah disiapkan. Harapan terjadinya gangguan teknis (jaringan) bisa diminimalisir sejak awal. "Menjelang pelaksanaan seleksi PPDB jenjang SMA/SMK se-

Dijelaskan Didik, seperti sudah disosialisas- jumlah persiapan terus kami lakukan. Khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pendukung seperti jaringan. Guna mengantisipasi adanya kerusakan atau gangguan teknis saat PPDB, kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo berkaitan dengan server. Selain itu kami juga bekerjasama dengan pihak lain untuk memback up sistem PPDB supaya jangan sampai di hack. Karena iika sistem PPDB sampai di hack bisa menimbulkan terjadinya kekacauan," kata Didik.

> Diungkapkan, meski pelaksanaan PPDB dilakukan secara online, tapi pihaknya tidak bosan mengingatkan masyarakat khususnya orangtua siswa untuk selalu mengedepankan penegakkan Prokes. Karena berdasarkan pengalaman selama ini meski menggunakan sistem online ada beberapa orangtua siswa yang memilih untuk datang langsung ke sekolah.

> Sementara itu Kepala SMAN 9 Yogyakarta Drs Jumadi MSi menyatakan, meski PPDB dengan model zonasi bukan hal baru bagi sekolah, tapi untuk mengantisipasi adanya kesalahan persepsi, sekolah berharap kebijakan baru segera disosialisasikan, begitu pula untuk soal kesiapan server dari Disdikpora DIY.

> Kepastian tentang kesiapan server diperlukan untuk mengantisipasi adanya gangguan saat pelaksanaan PPDB. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang persiapan harus lebih dimatangkan. Oleh karena itu pihak nya berharap segera ada sosialisasi resmi dari Disdikpora DIY. Begitu pula untuk kesiapan server yang dipergunakan dalam PPDB harus dipastikan benar-benar aman.

(Jon/Ria)-f

Yasonna: Sambungan hal 1

misalnya Thailand dan Je-

Yasonna menjelaskan, perbedaan dengan sebelumnya, dalam draf RUU KUHP pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan. Padahal, ujar Yasonna, pejabat publik juga punya hak hukum untuk menjaga harkat dan martabat. Yasonna bercerita, tidak mau dihina pribadinya, berbeda dengan kritik kinerja.

"Saya selalu katakan, kalau saya dikritik, Menkum HAM nggak becus, lapas, imigrasi, thats fine with me, tapi kalau sekali menyerang harkat martabat saya, misalnya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya nggak bisa. Dikatakan anak PKI, tunjukkan kalau saya anak PKI. Kalau nggak bisa gue jorokin lu," kata Yasonna.

Untuk itu Yasonna mengatakan, tidak bisa kebebasan dibiarkan sebebas-bebasnya. Jika sebebas-bebasnya merupakan anarki. "Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab," tegasnya.

Yasonna menambahkan, presiden sendiri tidak masalah dengan pasal tersebut. Lagi pula, menurutnya, aturan tersebut penting tidak hanya

wajar di beberapa negara lain, untuk presiden saat ini, tetapi juga untuk presiden yang akan datang.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan agar pasal terkait penghinaan presiden-wakil presiden vang diatur dalam Rancangan KUHP dialihkan menjadi ranah perdata, sehingga penyelesaian kasusnya tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif.

"Saya dari dulu paling benci pasal penghinaan presiden. Saya menyarankan agar dialihkan ke ranah perdata, sehingga penyelesaiannya tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif," kata Habiburokhman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menkumham.

la menilai selama pasal terkait penghinaan presidenwapres masih dalam ranah pidana, tuduhan pasal tersebut digunakan untuk menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan akan terus tim-(Sim)-d



Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	°C 24-31	Kelembabar
3		2	0		
\Diamond	0	03			
		Wag St		23-31	65-95
3	*			24-31	60-95
0	0	23	0	23-31	65-95
**				23-31	65-95
23 - C	> Berawa	an 😂 U			
	3	3 O	0 0 23 3 0 23	0 0 0 0 3 0 0 0	○ ○ ② ○ 23-31 ③ ○ ② ○ 23-31